

POTRET KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2018 DENGAN INDIKATOR RASIO GINI, KURVA LORENTZ, DAN UKURAN BANK DUNIA

M.Anas¹, Lilia Pasca Riani² dan Dian Lianawati³

¹Program Pascasarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: emanas@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: bungalilia@gmail.com

³Program Pascasarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri

ABSTRAK. Permasalahan klasik pembangunan ekonomi di Negara-negara di dunia, baik negara maju maupun Negara berkembang adalah adanya ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan konsekuensi dari suatu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Penelitian ini merupakan studi komparasi menggunakan data Badan Pusat Statistik, kemudian diolah menggunakan 3 metode sebagai perbandingan, yaitu Indeks Rasio Gini, Kurva Lorentz, dan ukuran Bank Dunia. Hasil studi menunjukkan bahwa Gini ratio bulan September 2018 cenderung menurun dari 0,389 pada bulan Maret 2018 menjadi 0,384 pada bulan September 2018 atau turun 0,005 point dari bulan Maret 2018 sehingga ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia termasuk kategori ringan. Kriteria Bank Dunia *relative inequality* tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia bulan September 2018 tergolong relatif rendah (*low inequality*). Hal ini ditunjukkan kelompok 40% dari penduduk dengan pendapatan yang rendah dapat melakukan konsumsi per kapita sebesar 17,47%. Akan tetapi, kriteria ketimpangan yang ada kontradiksi dengan kenyataan saat ini. Kepemilikan kekayaan dari 1% dan 10% orang terkaya di Indonesia yang menguasai 46,6% dan 75,3% dari kekayaan negara. Pengeluaran per kapita penduduk kelompok terendah sebesar 17,47% dibandingkan dengan kelompok penduduk teratas yang 45,57%, ini menandakan bahwa tingkat konsumsi yang tinggi maka pendapatan juga tinggi. Terdapat *crony capitalism* yang kuat antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif yang mampu membuat kebijakan pemerintah menguntungkan mereka. Sehingga menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Kata Kunci : Rasio Gini, Kurva Lorentz, ukuran Bank Dunia, ketimpangan, distribusi pendapatan

1. Pendahuluan

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah pada masyarakat yang semakin makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara-negara di dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, yang salah satu indikatornya adalah Pendapatan Nasional per kapita (GNP per kapita). Namun demikian pertumbuhan *Gross National Product* per kapita yang cepat tidak serta merta dapat menambah atau memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Untuk melihat kemajuan pembangunan suatu Negara, tidak dapat hanya melihat pada GNP saja, melainkan yang lebih penting adalah hasil nyata adanya pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di negara tersebut. Dengan kata lain, sejauh mana distribusi pendapatan atau tingkat GNP dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah.

Keberhasilan pembangunan dapat ditentukan dari berbagai aspek. Antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya ukuran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sebuah pembangunan. Di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia masih beranggapan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang pesat masih menjadi harapan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun pada dasarnya, secara teori mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap awal pada akhirnya menimbulkan ketimpangan pembagian porsi pendapatan.

Hal ini dibuktikan secara empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang pesat umumnya disertai dengan pembagian pendapatan yang semakin timpang (Wie, 1981:2 dalam Maidar, 2017).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi yang tinggi ternyata belum dapat menciptakan pendistribusian pendapatan yang merata, namun justru kondisi ini seolah-olah hanya memberikan manfaat bagi golongan kecil masyarakat yang memiliki akses kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnetz mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan yang disebut dengan teori Kuznets. Menurut Kurnetz, hubungan Antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu Negara berkembang dapat digambarkan dalam kurva berbentuk “U terbalik”. Pada tahap awal pembangunan ekonomi disebuah Negara berkembang cenderung mengalami ketimpangan dala pembagian pendapatan. Kondisi ini akan semakin memburuk hingga level tertentu kemudian diikuti dengan pergeseran ketimpangan kearah yang lebih baik pada tahap selanjutnya pembangunan ekonomi (Hasibuan, 2003: 206 dalam Maidar, 2017).

Permasalahan klasik pembangunan ekonomi di Negara-negara di dunia, baik negara maju maupun Negara berkembang adalah adanya ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi selalu ada dan menjadi tantangan tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.diperlukan campur tangan yang aktif dari pemerintah dalam setiap kebijakan ekonominya sehingga semua kegiatan ekonomi masyarakat berada dibawah pengawasan pemerintah, jika tidak demikian, artinya kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar akan memberikan dampak negative bagi pembangunan ditahap selanjutnya, jurang kesejahteraan akan semakin melebar dari masa ke masa.

Majalah Forbes kembali meliris 50 orang terkaya Indonesia. menariknya, dalam keadaan ekonomi global yang sedang memburuk kekayaan mereka naik secara signifikan, yaitu dari USD 126 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 129 miliar atau Rp 1.844,7 triliun pada tahun 2018 atau naik sebesar USD 3 miliar. Kenaikan kekayaan kereka hampir sama dengan APBN kita tahun 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Pendapatan per kapita tumbuh mencapai Rp 56 juta per tahun. Dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 56 juta, berarti rata-rata warga Indonesia berpendapatan di atas Rp 4,6 juta, lebih 11 kali lipat di atas garis kemiskinan. Tahun 2018, garis kemiskinan adalah Rp 410.670 ribu per bulan atau Rp 4,93 juta per tahun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2018 sebesar 9,66% atau 25,67 juta penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sedemikian rupa ternyata belum dapat mengangkat ekonomi orang-orang kecil secara signifikan. Penyebabnya adalah penguasaan ekonomi hanya oleh segelintir orang saja. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sedikit orang kaya saja. Ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup tajam, antara kaum *the have* dan *the have not*.

Saat ini, ketimpangan ekonomi indonesia cukup parah. Hal ini dapat dilihat dari rasio gini yang mencapai 0,384. Rasio gini adalah suatu angka bernilai 0-1, di mana 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Ketimpangan ekonomi tampak pada penguasaan aset atau kekayaan. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan nasional. Bahkan, 10% orang terkaya menguasai 75,3% kekayaan nasional. Kondisi ini membuat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga terburuk di dunia, sebagaimana dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Oktober 2018.

Arsyad (2010) dalam Sari (2017) menyebutkan adanya 3 (tiga) permasalahan klasik yang menjadi faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendpatan di Negara berkembang, yaitu (1) penambahan atau peningkatan jumlah penduduk yang tinggi sebagai penyebab menurunnya pendapatan perkapita; (2) tingkat inflasi yang tinggi dimana petambahan pendapatan berupa uang tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang-barang; dan (3) adanya ketidakmerataan pembangunan yang terjadi antar wilayah tertentu.

Adelman dan Morris (Arsyad 1992:174) dalam Maidar (2017), mengatakan bahwa yang dapat menyebabkan ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan adalah (1)

tingginya angka pertumbuhan penduduk yang dapat menurunkan tingkat pendapatan perkapita; (2) inflasi, penambahan pendapatan berupa uang yang tidak diikuti secara proporsional oleh penambahan produksi barang-barang; (3) ketidakmerataan pembangunan antar wilayah; (4) investasi yang sangat besar dalam proyek padat modal (*capital intensive*), peningkatan persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan persentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, yang menyebabkan pengangguran bertambah; (5) mobilitas sosial yang masih rendah, (6) penerapan kebijakan impor barang substitusi industri sehingga terjadi kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) ketidakelestarian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang menyebabkan memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju; (8) hancurnya industri-industri kecil seperti industri kerajinan rakyat, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang merata, Suyono (2000) dalam Damanik (2018) menyatakan bahwa dalam jangka panjang peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu Negara merupakan akibat dari adanya proses pembangunan ekonomi yang merata antar wilayah. Menurut Todaro (2006) dalam Damanik (2018) terdapat 2 ukuran pokok dalam mengukur pemerataan distribusi pendapatan, yaitu (1) distribusi pendapatan personal atau pendapatan pribadi dan (2) distribusi pendapatan fungsional sebagai simbol dari distribusi pendapatan menyeluruh yang di ilustrasikan secara proporsional yakni sebesar 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, sebesar 40% penduduk dengan penghasilan menengah, dan 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Dalam mengukur adanya ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh, terdapat 3 indikator yakni (1) Indeks Gini atau koefisien gini; (2) Kurva Lorentz; dan (3) Menurut ukuran dari Bank Dunia

2. Kajian Teori

GINI RATIO

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh.

Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa.

Nilai Gini Ratio:

GR < 0,4 : Ketimpangan rendah

0,4 < GR < 0,5 : Ketimpangan sedang

GR > 0,5 : Ketimpangan tinggi

Todaro dan Smith (2006) dalam Wijaya (2017) menyatakan bahwa koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria yaitu:

- a) **Prinsip anonimitas (*anonymity principle*)**: ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin
- b) **Prinsip independensi skala (*scale independence principle*)**: ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupee atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin.

- c) **Prinsip independensi populasi (*population independence principle*):** prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya, perekonomian Cina tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk Cina lebih banyak.
- d) **Prinsip transfer (*transfer principle*):** prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip Pigou-Dalton. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

PERHITUNGAN GINI RATIO

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Dimana:

G : Koefisien Gini (Gini Ratio)

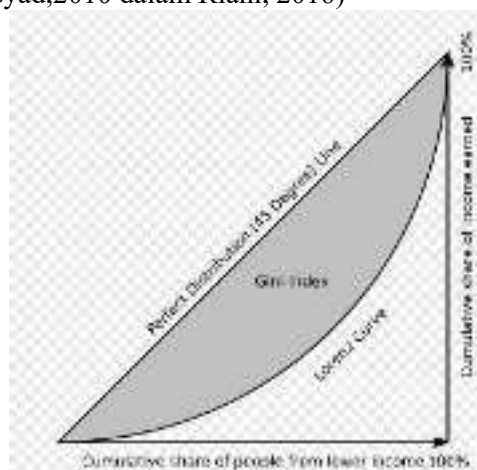
X_k : Kumulatif proporsi populasi

Y_k : Kumulatif proporsi pengeluaran

Y_k diurutkan dari kecil ke besar (BPS, Januari 2019)

KURVA LORENS

Kurva Lorenz menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama satu periode tertentu, misalnya satu tahun. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi vertikalnya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi horizontalnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat dengan sumbu diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari sumbu diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad, 2010 dalam Riani, 2016)



Gambar 1
Kurva Lorenz

UKURAN MENURUT BANK DUNIA

Bank Dunia bekerja sama dengan Institute of Development Studies menentukan kriteria tentang penggolongan pembagian pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa (Chenery, 1975 dalam Syamsuddin, 2011):

- Jika suatu negara mempunyai 40% penduduk yang berpendapatan terendah dan memperoleh sekitar kurang dari 12% jumlah pendapatan negara, maka hal tersebut termasuk dalam keketimpangan yang tinggi.
- Bila suatu negara mempunyai 40% penduduk berpendapatan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima antara 12% -17% dari seluruh pendapatan negara, maka negara tersebut digolongkan sebagai negara dengan ketimpangan sedang.
- Jika suatu negara mempunyai 40% penduduk berpendapatan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima lebih dari 17 % dari total pendapatan negara, maka ketimpangan negara tersebut termasuk rendah.

Dengan adanya ukuran pengelompokan seperti di atas, akan lebih cepat diamati penduduk paling miskin yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan. Dalam menentukan sasaran kelompok, perlu dilakukan identifikasi kelompok, baik secara nasional maupun regional relatif lebih mudah dilakukan. Kemudian dalam membandingkan angka-angka ketimpangan pembagian pendapatan, harus lebih teliti, karena cukup banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya angka Gini Ratio.

3. Hasil dan Pembahasan

MAKNA DI BALIK ANGKA RATIO GINI

Ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan masyarakat, konflik sosial, dan kegaduhan politik. Ketimpangan akan menimbulkan resistensi masyarakat pada reformasi kebijakan pemerintah. Bagaimanapun pergantian kebijakan pemerintah, masyarakat tetap berpikir bahwa kebijakan tersebut tidak akan merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Oleh karena itu, disinilah tugas pemerintah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.



Sumber: BPS, Januari 2019

Gambar 1. Indeks Gini per September 2018

Gambar diatas merupakan data resmi dari Badan Pusat Statistik terntang perhitungan Indeks Gini di **Indonesia**. Per September 2018 ditetapkan Indeks Gini di Indonesia sebesar 0,384.

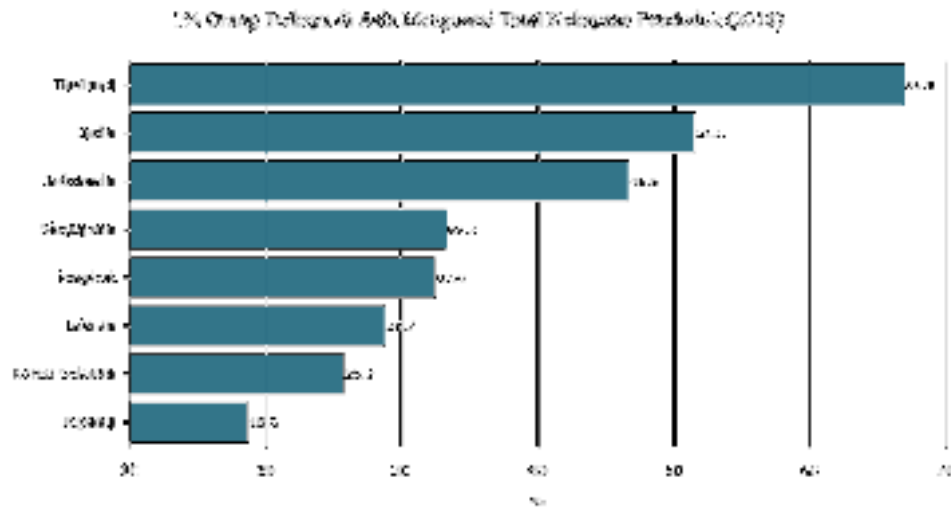
Daerah	Periode	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2017	16,33	36,74	46,93	0,404
	Mei 2018	16,47	36,93	46,60	0,401
	September 2018	16,79	37,46	45,75	0,391
Pedesaan	September 2017	20,25	40,04	39,71	0,320
	Mei 2018	20,15	39,59	40,26	0,324
	September 2018	20,43	39,74	39,79	0,319
Perkotaan dan Pedesaan	September 2017	17,22	36,66	46,12	0,391
	Mei 2018	17,29	36,62	46,09	0,389
	September 2018	17,47	36,96	45,57	0,384

Sumber: BPS, Januari 2019

Gambar 2. Distribusi Pengeluaran Penduduk Per Kapita, dan Gini Ratio di Indonesia

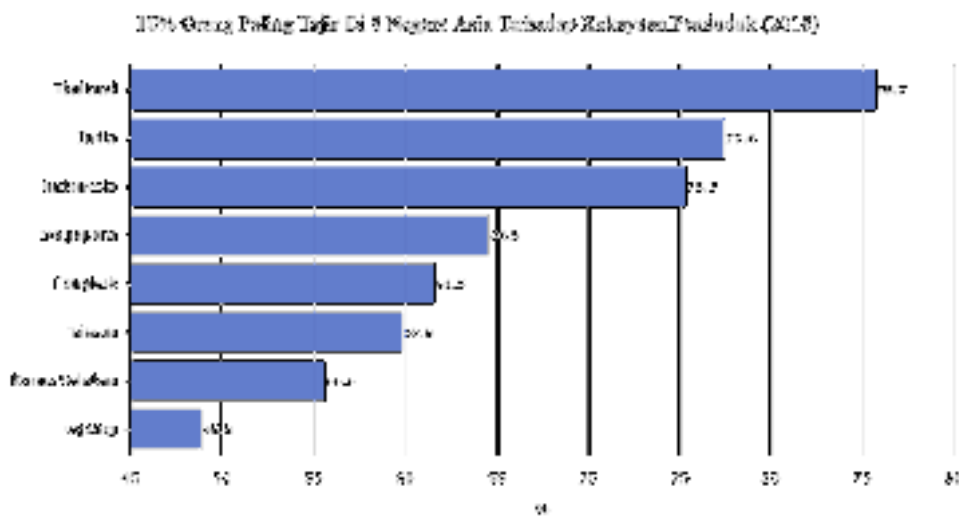
Dari data BPS bulan September 2018, Gini Ratio menunjukkan angka 0,384 yang menunjukkan kriteria ketimpangan rendah. Yang dibagi antara perkotaan sebesar 0,391 dan pedesaan sebesar 0,319. Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya dibawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17%. Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,47% yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Bila diperhatikan lagi, konsumsi kelompok penduduk teratas adalah sebesar 45,57%. Angka ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan konsumsi penduduk tingkat terbawah yang hanya sekitar 17,47%. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan tingginya tingkat konsumsi, maka tinggi pula pendapatannya. Disinilah terlihat ketimpangan yang cukup parah antara si kaya dan si miskin.

KEKAYAAN YANG DIMILIKI OLEH ORANG TERKAYA TERHADAP KEKAYAAN PENDUDUK



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 3. Presentase orang terkaya di Asia yang menguasai total kekayaan penduduk tahun 2018



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

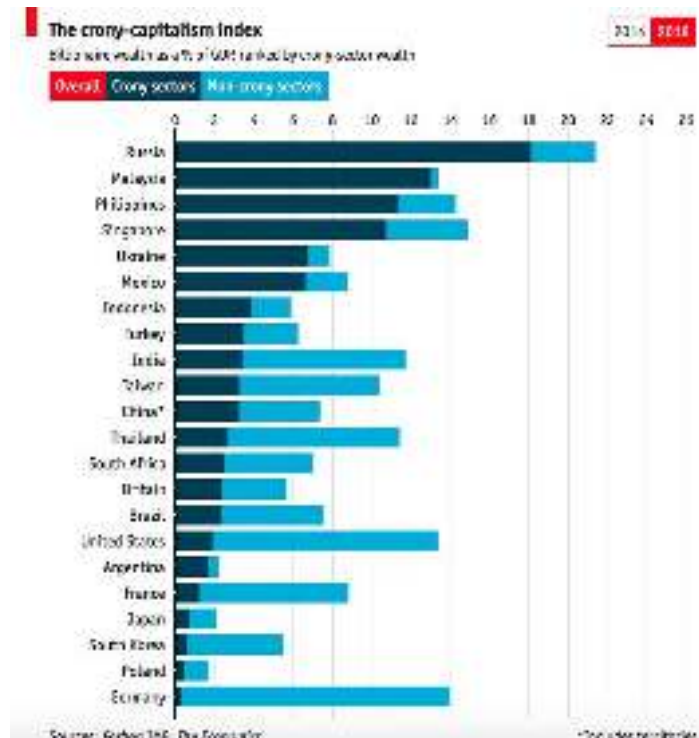
Gambar 4. Presentase orang terkaya di 8 Negara Asia yang menguasai total kekayaan penduduk tahun 2018

Ketimpangan juga dapat dilihat dari penguasaan kekayaan 1% dan 10% orang terkaya di Indonesia terhadap kekayaan negara.

Seperti yang dilansir oleh Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk

di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang kaya di negeri ini. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga bisa menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

PENYEBAB KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN



Sumber: <https://www.economist.com/>

- *Fundamentalisme* pasar, mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi
Selama ini, pemerintah lebih banyak menyerahkan urusan ekonomi kepada pasar, dengan pandangan bahwa pasar memiliki kemampuan *self regulating* dan *self controlling*. Nyatanya, *free competition* dan *market fundamentalism* telah mendorong pelaku pasar yang kuat untuk mendistorsi pasar sehingga memperoleh keuntungan yang besar.
- *Political capture* yang meningkat, orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh untuk mengubah aturan yang menguntungkan mereka
Political capture merupakan salah satu bentuk *crony capitalism* di Indonesia. Pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat ke tujuh se dunia. Hal ini menandakan bahwa orang-orang kaya di Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintah. Ikatan ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan mereka. Ini terlihat dari banyak terungkapnya KKN antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif.
- Ketidaksetaraan gender
Pada jaman sekarang ternyata masih ada ketidaksetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari lebih perpeluangnya kaum laki-laki dalam memperoleh pekerjaan daripada kaum perempuan.
- Ketimpangan akses infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan

Ketimpangan infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketidakmerataan pendistribusian pendapatan. Infrastruktur yang lengkap di perkotaan menyebabkan perekonomian berjalan lancar bila dibandingkan dengan daerah pedesaan.

- Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengentaskan diri dari jurang kemiskinan
Rendahnya upah buruh menyebabkan rendahnya kualitas hidup mereka mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai kesejahteraan. Hal inilah yang menyebarkan sulitnya kelompok bawah mengentaskan diri dari kemiskinan.
- Kegagalan sistem pajak dalam mendistribusikan kekayaan
Beberapa tahun terakhir pajak sedang menjadi sorotan, karena pajak bukan hanya memiliki fungsi fiskal sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai redistribusi pendapatan. Perbaikan dalam sektor pajak diharapkan dapat mempersempit ketimpangan yang ada. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaharui kebijakan dan UU perpajakan di Indonesia. Kontruksi kebijakan dan UU pajak yang tidak secara tegas dan jelas seperti progresivitas tarif, *allowance* seperti PTKP (penghasilan tidak kena pajak), insentif untuk industri, *tax bracket*, dan lain sebagainya yang menyebabkan pajak belum mencerminkan visi keadilan dan pemerataan.

DAMPAK KETIMPINGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

- Menurunkan kesejahteraan masyarakat
Penurunan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang mereka peroleh. Penurunan kesejahteraan ditandai dengan turunnya daya beli masyarakat kelompok tersebut.
- Menurunkan kualitas pendidikan
Dengan pendapatan yang rendah, akan ada kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari apalagi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dimana biaya pendidikan dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Hal inilah yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan masyarakat kelompok bawah yang akhirnya kalah dalam persaingan mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin penghidupan yang lebih layak.
- Menurunkan tingkat kemampuan dan spesialisasi SDM
Dengan rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan menurunnya tingkat kemampuan dan spesialisasi SDM. Penurunan ini menyebabkan lemahnya daya saing SDM Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Perbaikan dalam lini ini perlu dilakukan, baik dengan perbaikan pendidikan sektor formal maupun nonformal ataupun dengan memberikan bekal ketrampilan agar SDM Indonesia tetap bisa bersaing dengan negara lain.
- Menurunkan kualitas kesehatan
Rendahnya pendapatan, banyaknya kebutuhan hidup akhirnya menyebabkan masyarakat kelompok bawah mengesampingkan masalah kesehatan. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah kesehatan yang sebenarnya dapat mengurangi produktivitas mereka. Kurangnya perhatian tentang kesehatan, menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat seperti TBC, stunting (kurang gizi yang menyebabkan anak kerdil), imunisasi, dan lain sebagainya. Perhatian pemerintah tentang masalah kesehatan dewasa ini adalah penyakit tidak menular dan gizi. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah BPJS. Tetapi dalam prakteknya, hasil yang diharapkan masih jauh dari harapan.
- Meningkatkan pengangguran
Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks di negara kita. Rendahnya kualitas SDM, kurangnya keterampilan, dan ketatnya persaingan di dunia kerja membuat sebagian besar masyarakat kelompok bawah tersisih yang akhirnya menyebabkan pengangguran.

CARA MENGATASI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

- Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan)
Sudah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan UMKM, pemberian KUR, pelatihan keterampilan, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya.
- Pemberian dana sosial tepat sasaran
Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia memiliki sejumlah program bantuan sosial. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar dan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam kenyataannya, bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaharui *database* penerima manfaat. Sedangkan untuk dana pendidikan, besaran bantuan tidak sesuai dengan biaya pendidikan, serta pemantauan yang lemah. Karena itu pemerintah perlu menyesuaikan tingkat manfaat setiap tahun untuk memastikan bantuan sesuai biaya sekolah di setiap jenjang pendidikan.
- Memperluas kesempatan kerja
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembangunan di pedesaan: Pemerintah juga harus menaruh perhatian penuh pada daerah pedesaan agar pembangunan bersifat merata, terutama dalam hal kesempatan kerja.
 - b. Menyediakan informasi tentang lowongan kerja: Keterbatasan informasi juga menjadi penghalang antara perusahaan dan tenaga kerja untuk bisa saling bertemu dan bernegosiasi. Pemerintah mungkin harus menyediakan wadah resmi agar masyarakat bisa mengetahui lebih banyak informasi seputar pekerjaan.
 - c. Mendirikan usaha padat karya : Perusahaan swasta adalah suatu jenis persaingan yang ketat dan menuntut skill dari para tenaga kerja. Sementara itu, masih banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan cukup namun membutuhkan pekerjaan. Pemerintah harus turun tangan membantu masyarakat dalam hal ini.
 - d. Menyelenggarakan kursus keterampilan : Masyarakat harus dibantu pemerintah membangun keterampilan yang semakin dibutuhkan sebagai spesifikasi mendapatkan pekerjaan. Dengan diadakan banyak penyuluhan atau seminar, maka masyarakat akan semakin berilmu dan kursus keterampilan juga bisa mengasah kemampuan tangan masyarakat.
 - e. Membuka lahan baru : Khususnya bagi masyarakat perkotaan, pemerintah harus memberi anjuran untuk pindah ke pedesaan dan membuka lahan baru di sana. Hal ini bisa meningkatkan kesempatan kerja masyarakat desa tanpa harus pergi ke kota.
 - f. Memberi kesempatan para TKI bekerja di luar negeri : Pemberian bekal keterampilan dan mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk menyalurkan tenaga kerja merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk menambah penerimaan negara berupa devisa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan devisa negara sebagian berasal dari tenaga kerja dalam negeri yang bekerja di luar negeri.
 - g. Menurunkan ketimpangan kekayaan : Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja dan implementasinya belum optimal. Padahal, kalangan di luar tenaga kerja seperti dewan direksi, para pengusaha, atau pemilik modal seharusnya memiliki kewajiban pajak yang lebih besar.

dibanding para pekerja. Oleh karena itu, perbaikan dan memperketat kebijakan pemerintah di sektor pajak perlu dilakukan.

- h. Merangsang kemauan berwiraswasta : Pada saat ini persaingan dalam memperoleh pekerjaan sangat tinggi. Rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan merupakan salah satu faktor penyebab tersisihnya seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, memberi wawasan untuk berwirausaha merupakan salah satu solusi yang dapat diambil pemerintah. Upaya yang sudah dilakukan adalah mendirikan tempat pelatihan keterampilan, kursus, penyuluhan, dan perbaikan kurikulum di sekolah yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan sudah diterapkan saat ini.

4. Kesimpulan dan Saran

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa walau angka rasio gini dan ukuran Bank Dunia ketimpangan Indonesia ada pada level rendah, tetapi kenyataan yang ada di Indonesia jurang pemisah antara si kaya dan si miskin cukup dalam. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan kekayaan, pengeluaran per kapita penduduk kelompok terendah yang hanya 17,47% dibanding dengan kelompok penduduk teratas yang 45,57%, serta adanya *crony capitalism* yang kuat antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif yang mampu membuat kebijakan pemerintah menguntungkan mereka. Sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Saran bagi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan:

- Memperbaiki kualitas SDM baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan
Untuk memperbaiki dari segi pendidikan, pemerintah dapat memberikan bantuan dana sosial untuk siswa tidak mampu, memperbaiki kurikulum agar bisa mengikuti perkembangan jaman, dan masih banyak lagi. Dari segi kesehatan, diharapkan pemerintah memberikan bantuan yang bersifat lebih fleksibel agar masyarakat miskin tetap bisa merasakan kebijakan yang ada. Dengan adanya perbaikan di segala lini, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut membaik.
- Pemerataan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan agar roda perekonomian berjalan lancar
Kegiatan ekonomi di wilayah desa dan kota harus ditingkatkan dan diintegrasikan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dalam proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah akses ekonomi antara desa dan kota, laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik dan meningkatkan perekonomian.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah dengan cara memperluas kesempatan kerja
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah harus memberikan dukungan melalui kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk serta penciptaan lapangan kerja yang dilengkapi dengan perlindungan sosial yang memadai.
- Perbaikan disektor pajak
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara. Tetapi penerimaan dari pajak belum maksimal. Hal ini dikarenakan peraturan yang kurang tegas. Perbaikan sektor pajak dapat dilakukan dengan memperbaiki kebijakan dan UU perpajakan di Indonesia. Misalnya dengan memaksimalkan pemberlakuan pajak progresif agar masyarakat kelas atas membayar pajak sesuai dengan proporsinya. Dengan memaksimalkan peran pajak, diharapkan aliran kekayaan masyarakat jelas dan merata.
- Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan
Ikatan yang kuat antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif di Indonesia cukup kuat. Hal ini di buktikan dengan maraknya kasus KKN yang menyandung para pengusaha dan petinggi negara. Adanya *Political capture* yang sanggup mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menggemukkan para pengusaha dapat mempengaruhi atau

mempertajam kesenjangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya pemberantasan korupsi dan perbaikan birokrasi agar didapat penghidupan yang adil dan makmur di masyarakat Indonesia

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2019. Gini Ratio September 2018 tercatat sebesar 0,384. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1548/gini-ratio-september-2018-tercatat-sebesar-0-384.html>
- Damanik, Anggiat Mugabe. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1. ISSN: 2303-1255 (online)
- Maidar, Rosti. 2017. Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. E-ISSN. 2549-8355
- Riani, Westi. 2016. Keterbatasan Indeks Gini sebagai Ukuran Ketimpangan Pendapatan dan Solusi Metoda Alternatif. Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472
- Syamsuddin, 2011. Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 1, No.4
- Wijaya, Jeremy Liam. 2017. Apakah yang dimaksud dengan Koefisien Gini?. <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371/2>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/09/10-orang-terkaya-di-indonesia-kuasai-75-kekayaan-penduduk>
- <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world>